

## RELAWAN DEMOKRASI SEBAGAI KOMUNIKATOR POLITIK BAGI PEMILIH PEMULA

Susilastuti DN<sup>1</sup>; Adi Soeprapto<sup>2</sup>; Basuki Agus Suparno<sup>3 1,2,3</sup> n<sub>mu</sub> **Komunikasi dan Ilmu Administrasi Niaga Fisip UPNVY**  
'[susilastuti@gmail.com](mailto:susilastuti@gmail.com); [adi\\_soeprapto@yahoo.com](mailto:adi_soeprapto@yahoo.com); [basuki.agus@gmail.com](mailto:basuki.agus@gmail.com)

### ABSTRAK

Pemilih pemula merupakan kelompok strategis dalam pemilu 2014. Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula. Kelompok ini menjadi salah satu dari lima segmen strategis yang mendapatkan perhatian khusus untuk kegiatan sosialisasi politik. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada pemilu legislatif dan DPD membentuk relawan demokrasi (Relasi) ini merupakan pelopor-pelopor demokrasi yang menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diambil dengan menggunakan wawancara terstruktur dan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan mantan Relasi KPU Kota/Kabupaten. Berdasarkan hasil penelitian tentang Pengembangan Model Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula ditemukan bahwa relawan demokrasi sebagai komunikator politik mampu menjelaskan pesan politik dalam bahasa anak muda, sehingga lebih mudah dipahami. Password "satu suara bisa mengubah masa depan bangsa" selalu digunakan untuk menarik minat pemilih pemula menggunakan hak pilihnya. Keberadaan Relasi ini hanya bersifat "project" sehingga ketika pemilu legislatif usai maka Relasi ini juga dibubarkan. Penelitian ini merekomendasikan agar mantan Relasi ini dijadikan sebagai agent bagi pemilih pemula untuk mendiskusikan masalah-masalah politik. Keterlibatan pemilih pemula dalam pemilu juga akan memunculkan kesadaran kritis dan tanggungjawab atas keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.

*Kata kunci: Relawan Demokrasi, Komunikator Politik, Pemilih Pemula*

### PENDAHULUAN

Kehadiran relawan demokrasi (Relasi) pada pemilihan umum (Pemilu) tahun 2014 khususnya Pemilu memilih DPR, DPRD Propinsi, DPRD Kota/kabupaten dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) membantu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat kabupaten/kota untuk melakukan sosialisasi kepada lima segmen masyarakat. Program Relawan Demokrasi yang digagas KPU melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 5 (lima) segmen pemilih strategis yaitu pemilih pemula, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran.

Pelopor-pelopor demokrasi ini dibentuk di setiap segmen yang kemudian menjadi penyuluh pada setiap komunitasnya. Segmentasi itu dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua komunitas mampu dijangkau oleh program KPU. Selain itu segmentasi tersebut adalah strategis baik dari sisi kuantitas maupun pengaruhnya dalam dinamika sosial politik berbangsa dan bernegara. Rekrutmen Relasi ini dilakukan oleh KPU kota/kabupaten diharapkan bisa lebih mendorong kelima segmen pemilih strategis menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2014.

Kelima segmen ini diasumsikan oleh KPU sebagai kelompok yang belum terjangkau secara maksimal untuk pendidikan politik, informasi tentang kepemiluan (mekanisme pendaftaran, system pencoblosan dll-red). Pemilih pemula menjadi salah satu segmen pemilih strategis karena kelompok ini dipandang sebagai kelompok yang belum mempunyai pilihan atau massa mengambang.

Kelompok pemilih pemula dalam penelitian ini adalah mereka yang berusia antara 17 -21 tahun ini ditengarai menjadi kelompok yang diperebutkan karena mereka belum memiliki sikap politik. Apabila kurang mendapatkan informasi yang cukup

tentang politik, pemilu, partisipasi politik dan lainnya, akan menjadi pemilih yang tidak cerdas atau ada keengganan untuk menggunakan hak pilihnya alias golput.

Data BPS menyebutkan, tidak kurang dari 15% pemilih pada Pemilu 2014 adalah pemilih pemula. Selain itu data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu menunjukkan, data pemilih berumur 10 - 20 tahun berjumlah 46 juta, dan data pemilih berumur 20 — 30 tahun berjumlah 14 juta, sehingga perkiraan jumlah pemilih pemula sekitar 50 jutaan ([www.kpu.go.id](http://www.kpu.go.id) akses 7 Juni 2015).

Pemilih pemula, menjadi fokus perhatian dalam penelitian ini karena memang paling rentan untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena masih minim pemahamannya tentang politik. Kelompok pemilih pemula ini sering disebut sebagai sebagai massa mengambang yang belum mempunyai orientasi pilihan politik. Kelompok ini "menjadi" target sasaran dari partai politik dengan harapan mereka bisa menjadi konstituen dan memberikan pilihan pada saat pemungutan suara.

Sesuai dengan UU No. 8 Tahun 2012 dalam Bab IV pasal 19 ayat 1 dan 2 serta pasal 20 menyebutkan bahwa warga negara yang memiliki hak memilih adalah Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin yang terdaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara pemilu dalam daftar pemilih.

Pemilih pemula bukanlah pemilih yang tidak mempunyai referensi politik sama sekali sehingga sering diasumsikan kelompok pemilih yang mudah dipengaruhi orientasi politiknya. Mengacu pendapat Almond dan Verba (1990:16) orientasi politik pemula ini dikategorikan menjadi, (1) orientasi kognitif, yaitu pengetahuan tentang dan kepercayaan pada kandidat, (2) orientasi politik afektif, yaitu perasaan terhadap pemilu, pengaruh teman terhadap penentuan pilihan, dan (3) orientasi politik evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat pemilih pemula terhadap parpol/kandidat pilihannya. Orientasi politik pemilih pemula selalu dinamis dan akan berubah-ubah mengikuti kondisi yang ada dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

Setiajid (2011) menguraikan karakter pemilih pemula sebagai berikut: (1) belum pernah memilih atau melakukan penentuan suara di dalam TPS, (2) belum memiliki pengalaman memilih, (3) memiliki antusias yang tinggi, (4) kurang rasional, (5) pemilih muda yang masih penuh gejolak dan semangat, yang apabila tidak dikendalikan akan memiliki efek terhadap konflik-konflik sosial di dalam pemilu, (6) menjadi sasaran peserta pemilu karena jumlahnya cukup besar, (7) memiliki rasa ingin tahu, mencoba, dan berpartisipasi dalam pemilu, meskipun kadang dengan berbagai latar belakang yang berbeda.

Setiajid (2011) mengungkapkan bahwa pemilih pemula memiliki kedudukan dan makna strategis dalam pemilihan umum, mengingat : (1) alasan kuantitatif yaitu bahwa pemilih pemula ini merupakan kelompok pemilih yang mempunyai jumlah secara kuantitatif relatif banyak dari setiap pemilihan umum, (2) pemilih pemula adalah merupakan satu segmen pemilih yang mempunyai pola perilaku sendiri dan sulit untuk diatur atau diprediksi, (3) kekhawatiran bahwa pemilih pemula akan golput dikarenakan kebingungan terhadap banyaknya pilihan partai politik dan (4) masing-masing organisasi sosial politik mengklaim sebagai organisasi yang cocok menjadi penyalur aspirasi bagi pemilih pemula yang akhirnya muncul strategi dari setiap partai untuk mempengaruhi pemilih pemula.

Penelitian yang dilakukan Idrus Makulansenge dkk (2014) menunjukkan, salah satu sarana untuk memberikan informasi politik kepada pemilih pemula adalah melalui iklan. Penelitiannya menyimpulkan reklame politik wilwako mempunyai pengaruh yang cukup terhadap sikap pemilih pemula (20,795%). Reklame politik bukan satu-satunya variabel yang mempengaruhi sikap pemilih pemula. Variabel lain yang ikut mempengaruhi adalah faktor lingkungan, faktor pergaulan dimana pemilih pemula tinggal, keluarga, tingkat pendidikan dan nilai- nilai sosial yang dianutnya.

Penelitian tentang pemilih pemula juga dilakukan oleh J.W Batawi (2013) dengan menggunakan metode observasi, wawancara terstruktur. Penelitiannya ingin melihat tingkat kesadaran politik pemilih pemula dalam Pilkada. Hasil penelitiannya, tingkat kesadaran siswa sebagai pemilih pemula menunjukkan perbedaan yang didasarkan pada pemahaman dan pengalaman berpolitik di tingkat persekolahan. Sebagai pemilih pemula, mereka dihadapkan pada persoalan psikologis yaitu menempatkan jati diri dan pemahaman tentang belajar konsep berpolitik yang banyak dipengaruhi oleh pergaulan rekan sejawat dan lingkup persekolahan.

Penelitiannya juga berhasil menemukan, jika dipetakan dari tingkat kesadaran tidak terlepas dari pengalaman yang masih baru dan awam sebagai pemilih pemula sehingga peran guru dan lingkungan persekolahan dapat dijadikan laboratorium

berdemokrasi yang komprehensif. Kesadaran ikut aktif berpolitik telah menjadi kekuatan individu siswa dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pemilih muda pada Pemilu 2014 adalah generasi baru pemilih yang memiliki sifat/karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan yang berbeda dengan para pemilih generasi sebelumnya. Sebagian besar di antara mereka adalah dari kalangan bersekolah, berstatus ekonomi baik, dan umumnya tinggal di perkotaan atau sekitar perkotaan. Mereka sangat tersentuh kemajuan teknologi informasi, mereka menggunakan alat-alat teknologi canggih dengan baik, mulai dari handphone, laptop, ipod, ipad, mereka juga menggunakan fasilitas dan jaringan sosial media, seperti internet, twitter, facebook, linked, dan lain-lain dengan sangat baik. Mereka sangat terbuka untuk mempelajari hal-hal yang baru, kritis dan juga mandiri. Mereka menghadapi tantangan yang luar biasa berat mulai dari perubahan politik dan permasalahan dalam negeri yang tidak kunjung jelas arah penyelesaiannya sampai dengan tekanan-tekanan globalisasi, perdagangan bebas, terorisme, intervensi internasional, dan lain-lain.

Perbedaan sifat/karakter, latar belakang, pengalaman dan tantangan para pemilih muda Pemilu 2014 perlu dipahami dengan baik, terutama untuk mempersiapkan pemilih muda yang cerdas, kritis dan berorientasi masa depan. Apalagi mereka yang akan berada pada tampuk pimpinan pada saat Indonesia merayakan 100 tahun hari jadinya di tahun 2045.

Oleh karena itu, untuk mempersiapkan masa depan bangsa dan negara Indonesia dan untuk menjaga agar Pemilu 2014 dapat berjalan dengan baik dan output pemilu memiliki legitimasi yang cukup untuk memimpin pemerintahan, maka program pendidikan politik untuk para pemilih muda Indonesia sangat penting dan mendesak untuk dilakukan. Program pendidikan politik tersebut perlu dilaksanakan dengan cara dan metode baru dengan materi dan kurikulum yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, minat dan tingkat pengalaman serta pemahaman mereka tentang politik. (Mulyanto Amin, 2014)

Agus Suprojo (2014) juga melakukan penelitian terkait dengan pemilih pemula. Penelitiannya dilatar belakangi pesta demokrasi di Indonesia diadakan sebagai peristiwa politik pada anggota memilih dari legislatif dan wakil presiden eksekutif dan presiden. Pasca reformasi Indonesia telah terbukti bahwa pelaksanaan pesta demokrasi langsung, umum, bebas dan rahasia mampu berlangsung secara damai, namun masih sedikit pengamat yang menganalisis keberlanjutan pemilu mendatang— yang masa depan. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan Pemilihan Umum Partai 2014 Peserta sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Penelitiannya menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih pemula 2014 belum menunjukkan standar kepuasan karena kepekaan dan kepemahamannya atas parpol peserta pemilu sebagaimana ketentuan KPU dan UU No 8 tahun 2012 tidak dapat dimengerti.

Faktor penyebabnya adalah (1) apatisisme demokrasi pada pemilih pemula semakin tinggi karena pemberitaan politik lebih banyak pada kasus-kasus pelanggaran elite politik pada etika dan ketentuan hukum (2) media informasi politik (internet dan televise) tidak digemari (3) pemilih pemula tidak pernah mendapatkan politik maupun sosialisasi berkenaan dengan pelaksanaan pemilu 2014, (4) KPU harus memperhatikan potensi pemilih pemula yang akan menentukan keberlanjutan demokrasi politik pada pemilu berikutnya. (5) Pembangunan politik dibutuhkan oleh partai politik yang berkepentingan dalam penentuan arah kebijakan pada pemilu 2014.

Berdasarkan paparan di atas, maka ada beberapa indikator tentang pemilih pemula yang perlu dicermati (1) pemilih pemula adalah kelompok pemilih yang strategis sehingga perlu ditangani dengan baik (2) kurangnya informasi politik yang cukup akan mendorong sikap apatisisme politik di kalangan pemilih pemula, (3) sekolah menjadi salah satu laboratorium politik bagi pemilih pemula.

Posisi pemilih pemula dan Relasi dalam struktur politik berada di tingkat infrastruktur politik. Dalam system politik, infrastruktur politik salah satunya adalah memberikan support dan demand kepada kebijakan public yang dihasilkan oleh suprastruktur politik baik legislative, eksekutif atau yudikatif. Aktivitas komunikasi antara pemilih pemula dan Relasi adalah aktivitas komunikasi politik.

Komunikasi politik menurut Astrid Susanto (1988) merupakan suatu kegiatan pra politik melalui kegiatan mana akan terjadi realisasi penghubungan atau pengkaitan masyarakat dan lingkup negara. Pendapat lain yang berbeda dikemukakan oleh M Alwi Dahlan (1990:1), komunikasi politik merupakan bidang atau disiplin yang menelaah perilaku dan kegiatan komunikasi

yang bersifat politik, mempunyai akibat politik. Tujuannya bukan sekedar untuk memberi penanaman atau istilah pada gejala atau keadaan politik tetapi menganalisis dan memahami perilaku manusia serta sebab-sebabnya secara sistematis.

Komunikasi politik, sebagai layaknya darah mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik, dan hasil pemrosesan itu yang tersimpul dalam fungsi-fungsi *output*., dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi *feedback* sistem politik (Alfian, 1991:1).

Komunikator politik pada komunikasi politik terdiri dari komunikator di tingkat suprastruktur politik maupun infrastruktur politik. Suprastruktur politik menjadi komunikator politik tatkala menyampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah atau menjawab tuntutan maupun dukungan dari infrastruktur politik. Infrastruktur politik menjadi komunikator politik tatkala menjalankan fungsi artikulasi kepentingan atau agregasi kepentingan.

Komunikator politik terdiri dari (1) Partai politik (*political party*) yaitu suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dan biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka (Meriam Budiarja, 2002), (2) Interest Group (kelompok kepentingan), yaitu merupakan satu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan yang sama dan mereka melakukan kerja sama untuk mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah demi tercapainya kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginannya tadi (Haryanto, 1982), (3) Kelompok wartawan, adalah mereka yang menjalankan tugas jurnalistiknya yaitu mencari, menuliskan fakta-fakta atau kejadian-kejadian yang ada dalam masyarakat, (3) Kelompok mahasiswa, adalah mereka yang duduk di bangku perguruan tinggi, (4) Politikus, (5) Tokoh politik/pakar politik, adalah mereka yang karena keahliannya mempunyai kompetensi untuk mencapainya informasi/pandangan mengenai politik, (6) tokoh masyarakat.

Dalam konteks ini Relasi untuk segmen pemilih pemula menjadi komunikator politik karena berasal dari mahasiswa maupun tokoh masyarakat. Relasi mempunyai tugas menyampaikan pesan politik yang bertujuan mengubah pandangan dan perilaku untuk mendukung kebijakan yang dibuat suprastruktur politik. Pesan politik menyangkut Pemilu.

Namun, Relasi dalam melakukan aktivitas komunikasi dengan pemilih pemula tidak "hanya" sekedar menyampaikan "kata-kata" tetapi mengubah pandangan dan persepsi pemilih pemula tentang Pemilu. Tujuan akhirnya pemilih pemula bersedia mengubah perilaku dengan menggunakan hak pilihnya.

Relasi dalam menjalankan aktivitas komunikasi politiknya ini harus memperhatikan esensi komunikasi sehingga pesan yang disampaikan tidak mengalami kesalahan. Komunikasi pada dasarnya akan melibatkan dua orang atau lebih. Tujuan utamanya adalah menciptakan saling pengertian antara komunikator dan komunikan atas pesan yang akan disampaikan. Melakukan aktivitas komunikasi ini perlu mempertimbangkan nilai. Nilai sendiri suatu pandangan, cita-cita, adat, kebiasaan dan lain-lain yang menimbulkan tanggapan emosional pada seseorang atau masyarakat tertentu.

Maksudnya, jika seorang komunikator dalam konteks ini adalah Relasi akan melaksanakan aktivitas komunikasi atau mentransmisikan pesan komunikasi, ia harus mempertimbangkan nilai kebenaran (logika), nilai kebaikan, dan nilai keindahannya. Pentingnya memahami logika menurut Francis Bacon dalam bukunya "*Novum Organum*" yang dikutip oleh Onong U Effendi (1992) agar tidak terjerumus dalam kesalahan yaitu: *The idols of the cave*, yaitu kekeliruan yang disebabkan pemikiran yang sempit, yang tidak mampu melihat cakrawala yang luas sehingga tidak dapat melihat hubungan sebab akibat dari fakta-fakta yang dilihatnya. *The idols of the tribe*, kekeliruan yang disebabkan oleh hakikat manusia yang merasa dirinya dari suku tertentu, bangsa tertentu sehingga terjadi kesalahan dalam memahami hakikat kebenaran, suatu peristiwa atau menghindarkan diri dari ukuran semesta. *The idols of the forum*, kekeliruan yang disebabkan karena penguasaan bahasa yang mengakibatkan kurangnya kemampuan memilih dan menggunakan kata-kata yang tepat untuk mengungkapkan kebenaran. *The idols of the market place*, yakni kekeliruan karena terlalu tergar dalam mengidentifikasi dirinya kepada adat kebiasaan, ikut-ikutan dan lainnya.

Selain aspek tadi, Relasi dengan segmen kelompok pemilih pemula harus memiliki referensi politik, background aktivitas politik dan bekal. Pemilih pemula yang menjadi salah satu target kegiatan Relasi ini adalah kelompok yang belum memiliki referensi pilihan politik, pemahaman tentang pemilu masih sangat terbatas.

Kehadiran Relasi yang mengemban tugas untuk memberikan pencerahan tentang segala sesuatu tentang pemilu kepada pemilih pemula diharapkan bisa membantu kelompok ini mempunyai pemahaman tentang pentingnya pemilu sebagai sarana pergantian pimpinan yang paling konstitusional sehingga tidak keliru menggunakan hak pilihnya. Berkaitan dengan itu menarik untuk mengetahui bagaimana peran Relasi sebagai komunikator politik bagi pemilih pemula?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau melukiskan realitas sosial yang ada di masyarakat (Mantra, 2004). Menurut Sukardi (2010) penelitian deskriptif hanya berupaya menggambarkan secara jelas dan sekuensial terhadap pertanyaan penelitian yang telah disusun sebelumnya dan tidak menggunakan hipotesis sebagai petunjuk arah dalam penelitian. Namun demikian, lebih jauh penelitian ini mengidentifikasi kausalitas yang memperlihatkan jalur dan alur bagaimana suatu proses peran Relasi sebagai komunikator politik bagi pemilih pemula. Penelitian tentang peran Relasi sebagai komunikator politik merupakan penelitian yang berupaya untuk menggali informasi secara mendalam mengenai bagaimana Relasi menjalankan fungsinya sebagai komunikator politik.

Informan dalam penelitian ini mantan relawan demokrasi (Relasi) untuk segmen pemilih pemula dari KPUD kota/kabupaten yang ada di DIY. Informan ini digali tentang background aktivitas politiknya sebelum menjadi Relasi, motivasi dan tujuan menjadi Relasi, persiapan yang dilakukan sebelum menjalankan tugasnya sebagai Relasi, pelaksanaan kegiatan Relasi dan evaluasi kendala dan hambatan menjadi Relasi.

Sumber data dalam penelitian ini (1) data primer diambil melalui dialog interaktif, observasi terhadap obyek penelitian, (2) data sekunder berasal dari peraturan terkait dengan pemilu, relawan demokrasi, dokumen, Dokumen dan publikasi yang terkait mengenai pemilu di Daerah Istimewa Jogjakarta, Kertas kerja/TOR/Proposal/laporan kegiatan pendidikan pemilih/sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU maupun pihak lain.

Instrumen penelitian dilakukan melalui (1) wawancara terstruktur kepada pemilih pemula yang pernah ikut kegiatan Relasi (2) *Focus Group Discussion* (FGD), digunakan untuk memperoleh informasi secara terarah dan interaktif akan topik penelitian dengan melibatkan kelompok sasaran dan pihak-pihak yang terkait dalam hal ini adalah mantan Relasi dari KPUD kota/kabupaten di DIY.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data. Miles dan Huberman (1994) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Reduksi data (*data reduction*) yang dilakukan dengan merangkum data mengenai pemahaman pemilih pemula atas politik, pelaksanaan pemilu. Kemudian dilanjutkan dengan memfokuskan pada penelaahan mengenai aspek-aspek yang saling berinteraksi dalam proses kegiatan Relasi. Penyajian data (*data display*) yang dilakukan dengan cara narasi dan penyajian grafik dan gambar yang disusun secara sistematis atas hasil skoring kuesioner, dengan melakukan pengelompokan atas item-item pertanyaan dalam kuesioner dan pedoman wawancara untuk selanjutnya disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Kesimpulan /verifikasi yang dilakukan berdasarkan atas hasil reduksi dan penyajian data dengan cara mencocokkan data yang diperoleh selama proses pengumpulan data, penyajian data dan reduksi data.

## **HASIL PENELITIAN**

Relawan Demokrasi (Relasi) merupakan ujung tombak baru yang ikut membantu KPUD kota/kabupaten. Relasi dibentuk dengan sebuah kesadaran bahwa lembaga penyelenggara pemilu belum mampu menjangkau semua kelompok masyarakat sehingga ada sebagian dari kelompok masyarakat ini yang tidak mendapatkan informasi tentang pemilu dengan baik. Kelompok masyarakat yang disasar Relasi ada lima segmen strategis yaitu pemilih pemula, kelompok marginal, kelompok agama, kelompok perempuan, penyandang disabilitas dan kelompok pinggiran. Masyarakat yang direkrut menjadi Relasi disesuaikan dengan kelompok sarannya. Harapannya pesan yang akan disampaikan bisa diterima dengan baik, pada gilirannya mendorong kelompok masyarakat ini berpartisipasi dalam pemilu. Dalam penelitian ini yang menjadi kajian adalah Relasi untuk kelompok masyarakat pemilih pemula.

Selain itu, program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya."... Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal..." papar Komisioner KPU Pusat Dr.Sigit Pamungkas (wawancara di Jakarta, 3 Maret 2015)

Program relawan demokrasi muncul juga dilatarbelakangi oleh inflasi kualitas memilih. Tanpa mengabaikan apresiasi kepada pemilih yang menggunakan hak pilihnya secara cerdas, sebagian pemilih kita terjebak dalam pragmatisme. Tidak semua pemilih datang ke TPS atas idealisme tertentu tetapi ada yang didasarkan pada kalkulasi untung rugi yang sifatnya material, seperti mendapatkan uang dan barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari. Pragmatisme pemilih ini sebagian disumbang oleh tingkat literasi politik yang relatif rendah, melemahnya kesukarelaan masyarakat (voluntarisme) dalam agenda pencerdasan demokrasi, dan masifnya politik tuna ide dari kontestan pemilu.

Program Relasi diharapkan mampu menumbuhkan kembali kesadaran positif terhadap pentingnya pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya relawan demokrasi ini dapat menggerakkan masyarakat tempat mereka berada, agar mau menggunakan hak pilihnya dengan bijaksana serta penuh tanggung jawab, sehingga partisipasi pemilih dan kualitas Pemilu 2014 dapat lebih baik dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya.

Tujuan program Relasi ini meliputi (1) meningkatkan kualitas proses pemilu, (2) meningkatkan partisipasi pemilih,(3) Meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi (4) Membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi.

Untuk mencapai tujuan ini persyaratan Relasi secara umum adalah (1) Warga Negara Indonesia (2) Berusia minimal 17 tahun pada saat mendaftar, khusus untuk relawan pemilih pemula maksimal berusia 25 tahun. (3) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat, (4) Berdomisili di wilayah setempat, (5) Non-partisan, sekurang-kurangnya dalam 5 (lima) tahun terakhir, (6) Memiliki komitmen menjadi relawan pemilu, (7) Terdaftar sebagai pemilih, (8) Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, (9) Bertanggungjawab dan berakhlak baik (10) Bukan bagian dari penyelenggara pemilu (11) Memiliki pengalaman terkait kegiatan penyuluhan atau aktif dalam organisasi kemasyarakatan/kemahasiswaan, (12) Tidak pernah terlibat tindak pidana atau tidak sedang menjalani proses hukum atas tindak pidana.

Khusus untuk Relasi pemilih pemula ada batasan maksimal yaitu 25 tahun. Ini mengandung arti agar antara komunikator (Relasi) dan komunikan (pemilih pemula) ada kedekatan emosial. Relasi juga bisa mengikuti pola komunikasi yang biasa dilakukan oleh pemilih pemula, misalnya pemanfaatan media sosial atau sarana lainnya yang menggunakan teknologi komunikasi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Adi Suprpto dkk (2013) bahwa pemilih pemula menginginkan penggunaan media baru (new media) sebagai salah satu sarana bagi pendidikan politik, termasuk mensosialisasikan pemilu.

Dalam aktivitas komunikasi, baik komunikator dan komunikan idealnya dalam posisi yang equal sehingga tidak ada sekat-sekat yang bisa menghambat aktivis komunikasi. Selain itu bahasa yang akan digunakan diharapkan akan mudah dipahami oleh pihak-pihak yang menjalankan aktivitas komunikasi.

Rekrutmen Relasi dilakukan di tingkat KPU Kabupaten/kota. Jumlah Relasi maksimal 25 orang per kabupaten/ kota sehingga kalau segmen Relasi adalah lima segmen maka tiap segmen terdapat 5 Relasi. Rekrutment Relasi dilakukan secara terbuka di masing-masing kabupaten/kota atau berdasarkan usulan atau rekomendasi dari institusi strategis setiap komunitas.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa tidak semua memiliki background atau latar belakang yang bersentuhan dengan aktivitas politik. Bahkan ada beberapa yang selama pelaksanaan pemilu memilih tidak menggunakan hak pilihnya. Motivasi menjadi Relasi juga dilatarbelakangi (a) coba-coba, (b) proses belajar, (c) mengisi waktu luang,(d) ingin mengetahui lebih banyak tentang pemilu sebelumnya tidak mau memilih, (d) mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah, (e) ajakan teman. Berdasarkan temuan ini tidak semua Relasi untuk segmen pemilih pemula mempunyai pemahaman yang cukup tentang politik, tentang pemilu, serta motivasi yang kuat tentang kehadiran mereka dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas pemilih.

" \_ saya pada pemilu sebelumnya selalu golput atau tidak menggunakan hak pilih. Saya dulu golput karena tidak mendapatkan informasi yang cukup tentang politik dan pemilu. Setelah saya sebagai Relasi saya ingin agar pemilih pemula mendapatkan informasi yang cukup tentang politik dan pemilu..." papar Rahmad mantan Relasi dari Gunungkidul. Hal ini juga dilakukan oleh Dwi Susanti, mantan Relasi dari KPUD Sleman.

Sementara Rifaat mahasiswa Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM mantan Relasi dari KPUD Bantul mengemukakan, motivasi utama menjadi Relasi adalah untuk mempraktekkan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah. Hal itu juga dilakukan oleh mantan Relasi di KPU Kota Jogjakarta, Faisal dan Sari. Sementara Yoga yang selama ini aktif dalam berbagai organisasi kepemudaan direkomendasikan oleh KPU Kota Jogjakarta.

"... saya sejak dulu suka politik. Informasi politik yang peroleh melalui media mass atau membaca buku politik. Ketika ada penawaran menjadi Relasi saya mendaftarkan diri menjadi Relasi segmen pemilih pemula. Saya berharap bisa berkontribusi pada pemilu 2014 dengan bekal yang saya miliki..." papar Panggih mantan Relasi KPUD Kulonprogo.

Berdasarkan paparan di atas, keberagaman background dan motivasi Relasi untuk segmen pemilih pemula maka kompetensi Relasi perlu diperbaiki. Relasi mengemban tugas sebagai komunikator politik untuk menyampaikan pesan-pesan yang bisa mendorong masyarakat menggunakan hak pilihnya secara cerdas maka Relasi ini mengikuti Training of trainer (ToT) dan bimbingan teknis (bimtek) untuk Relasi. Melalui ToT dan Bimtek ini diharapkan bisa meningkatkan kompetensi Relasi sehingga

Komunikator akan memiliki trust terhadap pesan yang disampaikan Relasi. Materi untuk meningkatkan kompetensi Relasi mencakup (1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, (2) Pemahaman tentang teknis tahapan pemilu yang strategis, (3) Kode etik relawan, (4). Teknik-teknik berkomunikasi publik, (5) Materi lain yang relevan.

Mengingat ada target khusus yang hendak dicapai oleh KPU dengan melakukan rekrutment Relasi untuk lima segmen strategis tadi yaitu meningkatkan partisipasi pemilih secara kuantitas maupun kualitas maka KPU secara terpusat juga sudah membuat pokok-pokok pesan yang perlu disosialisasikan. Pesan atau message yang akan disampaikan oleh Relasi kepada pemilih pemula menjadi aspek yang penting sehingga Relasi perlu memiliki koridor sehingga diharapkan tidak terjadi bias.

Materi pesan yang harus disampaikan Relasi kepada pemilih pemula menyangkut (1) Pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi, (2) Tata cara pemberian suara dalam pemilu, (3) Pengenalan terhadap kontestan pemilu, (4) Hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan segmen. Melihat materi yang harus disampaikan ini, maka sebagian besar masih menyangkut hal teknis. Sementara materi menyangkut demokrasi, pemilu dan partisipasi yang akan disampaikan Relasi kepada pemilih pemula membutuhkan bekal pemahaman yang komprehensif tentang politik. Mengingat latar belakang Relasi yang beragam, maka Relasi mencari aman yaitu lebih banyak menyampaikan pesan yang bersifat teknis.

Berkomunikasi adalah senin tidak hanya sekedar menyusun kata untuk disampaikan kepada komunikan. Untuk itu Relasi perlu memiliki metode atau cara yang efektif . Relasi melalui bimtek diberi pembekalan tentang metode penyampaian pesan. Metode yang dipakai yang disarankan dipakai untuk menyampaikan materi antara lain : simulasi, bermain peran/role playing, diskusi kelompok, ceramah penggunaan alat bantu (visual dan non visual), posting materi sosialisasi ke media sosial.

"....sebelum menjalankan tugas kami mengikuti bimtek (bimbingan teknis), tapi muatan tentang politik terbatas, lebih banyak tentang teknis pemilu. Namun alat peraga yang bisa lebih membantu memperjelas pesan terlambat diterima Relasi. Bimtek sebagai salah satu sarana meningkatkan kompetensi Relasi kurang efektif....," tegas Rahmad mantan Relasi dari Gunungkidul.

Sari dari KPU Kota Jogjakarta menyebutkan, Bimtek hanya penjelasan teknis tentang kepemiluan yang disusun dalam buku saku, sementara metode penyampaian agar pemilih pemula dekat dengan politik tidak diberikan dengan mendalam. Ia dan teman-temannya kebetulan memiliki background politik karena kuliah di JPP Fisipol UGM mencoba menyelipkan pengetahuan politik secara teoritis dan empiris agar mereka menjadi terbiasa dengan informasi politik.

Job deskripsion tugas Relasi juga membingungkan beberapa mantan Relasi, mereka hanya mensosialisasikan hal teknis tentang kepemiluan ataukah melakukan pendidikan politik secara holistik. Kalau melakukan sosialisasi teknis kepemiluan alat peraga yang untuk Relasi terlambat sehingga menghambat jadwal pelaksanaan kegiatan. Namun kalau melakukan pendidikan

politik agar mereka lebih dekat politik waktunya sangat terbatas dibandingkan dengan luasnya dan besarnya kelompok pemilih pemula yang harus ditangani.

Dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan mantan Relasi segmen pemilih pemula, dalam melaksanakan tugasnya ada satu password yang selalu ditegaskan dalam setiap menyampaikan pesan yaitu "satu suara bisa mengubah masa depan bangsa" dan "menjadi pemilih yang cerdas" selalu digunakan untuk menarik minat pemilih pemula menggunakan hak pilihnya.

Namun "password ini tidak diikuti dengan konten pesan yang disampaikan pada saat sosialisasi dilakukan karena lebih banyak diisi untuk mensosialisasikan hal-hal teknis tentang Pemilu, mulai peserta pemilu, proses memilih dan cara memilih. Muatan pesan seperti ini kurang menjadi pendorong pemilih pemula untuk menjadi pemilih yang cerdas.

Untuk mendorong menjadi pemilih yang cerdas maka materi sosialisasi harusnya menyentuh wilayah substansi yang bersifat jangka panjang. Wilayah substansial mencakup untuk apa pemilu diadakan, untuk apa partisipasi politik pemilih pemula sebagai warga negara diperlukan, apakah partisipasi politik hanya berhenti pada saat pelaksanaan pemilihan umum atau berlangsung terus menerus. Pemilih pemula adalah generasi masa depan yang tentunya tidak *cukup hanya* diberi pembekalan teknis.

"... pendidikan politik untuk pemilih pemula tidak bisa dicampur adukkan dengan materi informasi yang bersifat hal-hal teknis. Keterbatasan yang kami miliki kami berusaha mengenalkan 'virus' politik agar mereka lebih dekat politik sehingga tidak hanya hal-hal yang sifatnya teknis. Namun kami akui apa yang kami lakukan belum bisa dikatakan berhasil..." Sari mantan Relasi KPU Kota Jogjakarta.

Relasi selain harus memperhatikan isi pesan yang akan disampaikan juga perlu mempunyai mapping terhadap kelompok sasaran. Mapping ini membantu Relasi mengidentifikasi kebutuhan sasaran, metode, jadwal waktu yang tepat melaksanakan kegiatan dan menyusun mitra kerja. Mitra kerja ini sangat dibutuhkan karena Relasi untuk bisa menemui pemilih pemula yang rata-rata masih duduk di bangku SMA.

Dalam FGD terungkap bahwa secara teknis Relasi untuk segmen pemilih pemula tidak mengalami kesulitan untuk menjalin mitra dengan pihak sekolah. Namun kendala utama adalah perijinan, serta penyesuaian waktu dengan kegiatan sekolah. Interaksi juga dijalin dengan organisasi kepemudaan seperti Karangtaruna.

Kemudahan menjalin interaksi juga didukung dengan kesadaran sekolah memberikan ruang untuk penyelenggaraan sosialisasi tentang pemilu. Relasi ini di beberapa sekolah juga bisa mempraktekan "pemilu" melalui pemilos (pemilihan Osis). Dilihat dari aspek kuantitas, kegiatan Relasi di segmen ini bisa dikatakan berhasil, namun aspek kualitas masih perlu diuji lagi. "... tidak ada gelombang penolakan atas kehadiran Relasi. Kami diterima dengan baik, tapi minim respon ketika diberi ruang untuk tanya jawab, banyak yang apatis..." papar Yoga dari KPU Kota Jogjakarta.

Apatis atau kurangnya respon pada Relasi ketika penyampaian materi sosialisasi menurut Iwan dari Bantul disebabkan pemilih pemula mendapatkan "contoh" yang kurang baik dari partai politik, mulai dari cara menyampaikan pesan, isi pesan hingga kecurangan pelaksanaan pemilu yang bisa diakses melalui berbagai media. Secara tidak langsung contoh tersebut memberikan informasi yang kurang baik.

Berdasarkan dokumen laporan kegiatan relasi kegiatan yang dilakukan sebagian besar adalah sosialisasi tentang teknis pemilu. Segmen pemilih pemula, Relasi banyak bekerjasama dengan sekolah. Menurut Yoga, sekolah membuka diri untuk kegiatan relasi namun proses perijinan ke dinas pendidikan sering menjadi kendala. Untuk karang taruna biasanya relasi hadir dalam kegiatan pertemuan karangtaruna atau membuat janji guna menyelenggarakan pertemuan sendiri.

Selain persoalan di atas, problem lain yang dihadapi Relasi dalam melaksanakan tugasnya adalah sikap independensi. Aspek ini penting karena menghindari jangan sampai Relasi menjadi "perpanjangan tangan parpol" tertentu. Kekhawatiran akan hal ini bukan tanpa alasan karena posisi Relasi ini sangat strategis yaitu bersentuhan dengan konstituen. Berkaitan dengan hal itu, maka dalam melaksanakan tugasnya Relasi ini di atur dengan kode etik. Kode etik relawan mencakup (1) Bersikap independen, imparial, dan don partisan terhadap peserta pemilu, (2) Tidak melakukan tindak kekerasan, (3) Menghormati adat dan budaya setempat, (4) Tidak bertindak diskriminatif, (5) Tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dari peserta pemilu yang menunjukkan indikasi keberpihakan atau gratifikasi.

Kode etik ini sangat membantu Relasi tatkala menghadapi pertanyaan dari segmen yang menjadi sasaran kegiatan terkait calon atau partai mana yang dipilih. Menurut Mumainah mantan Relasi dari Kulonprogo mengemukakan, pihaknya sering ditanya tentang siapa yang sebaiknya dipilih baik kandidat atau nama parpol. Adanya kode etik tersebut, pihaknya hanya



mendorong agar pemilih pemula menjadi pemilih yang cerdas dengan mencoba mencari track record kandidat dan mencermati program-programnya. "... kode etik tersebut sangat membantu kami untuk tidak keluar dari tujuan dan keberadaan kami ketika menyampaikan informasi tentang pemilihan. Kami juga tidak terjebak untuk berbicara soal partai atau kandidat tertentu", papar Mumainah.

Namun sayangnya, Relasi tidak diberi bekal tentang etika berkomunikasi. Etika komunikasi ini akan mempengaruhi etos komunikasi yaitu sikap komunikator yang tercermin dalam kata dan perilakunya yang mengandung perpaduan dari keahlian, kearifan, kebenaran, timbang rasa dan tenggang rasa. Dengan etosnya ini maka komunikator akan menjadi sumber kepercayaan dan sumber daya tarik. Sementara nilai estetika yang harus diperhatikan adalah bagaimana komunikator melancarkan komunikasi, termasuk pemilihan bahasa yang akan digunakan.

Aktivitas komunikasi politik sebenarnya bersifat kontinyu dan berkesinambungan tidak terbatas pada eventnya. Keberadaan Relasi ini hanya terbatas pada pemilu legislatif dan DPRD. Mereka segera dibubarkan begitu pemilu legislative dan DPRD selesai. Pada saat pemilu presiden Relasi ini tidak lagi diminta sebagai partner untuk kegiatan KPU. Bahkan setelah pemilu usai, KPU kota/kabupaten tidak mencoba melibatkan mereka sebagai agen untuk "menebarkan virus" politik kepada pemilih pemula agar mereka tidak "buta" politik.

## DISKUSI

Menggunakan hak pilih pada saat Pemilu, baik legislatif, DPRD atau presiden bukanlah sebuah kewajiban bagi setiap warga negara, tetapi hak. Memilih adalah hak maka tidak ada satu paksaan agar warga negara harus datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ukuran keberhasilan suatu pelaksanaan pemilu bukan semata-mata dihitung berdasarkan jumlah pemilih yang datang ke TPS, tetapi bagaimana warga negara memahami keberadaannya atau arid penting pemilu bagi dirinya selaku warga negara masyarakat yang demokratis.

Dalam konsep seperti ini, mendorong orang bersedia menggunakan hak pilih atau peduli dengan pemilu bukanlah sebuah pekerjaan yang pragmatis, sesaat dan dilabeli dalam sebuah "project" pesta demokrasi. Ada persoalan yang lebih esensial yaitu membuka pemikiran kepada warga negara bahwa pemilu adalah sebuah sarana untuk terjadinya perubahan kepemimpinan yang paling damai dan paling konstitusional.

Menyampaikan pesan seperti ini kepada masyarakat tidak mudah karena masyarakat harus diyakinkan dan perlu ada contoh. Hiruk pikuk kompleksitas persoalan politik di legislatif, eksekutif yang tercover oleh media juga menjadi faktor hilangnya trust masyarakat akan pentingnya pemilu sebagai sarana untuk pergantian sebuah pemerintahan yang membawa kebaikan bagi masyarakat. Bukan hal yang aneh apabila pasca reformasi tingkat partisipasi masyarakat untuk menggunakan hak pilih ada kecenderungan mengalami penurunan.

Pada pemilu 2014 Komisi Pemilihan Umum(KPU) mempunyai tekad untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilih. Salah satu strateginya adalah merekrut anggota masyarakat sebagai salah satu "agen" untuk mendekati lima kelompok strategis yang selama dinilai tidak menggunakan hak pilihnya yaitu segmen kelompok pemilih pemula, kelompok agama, kelompok disabilitas, kelompok marginal dan kelompok perempuan. Mereka ini oleh KPU dinamakan Relawan Demokrasi (Relasi). Seleksi Relasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Relasi ini beroperasi di tingkat kabupaten/kota dan jumlahnya maksimal 5 orang untuk setiap segmen.

Keterbatasan background pemahaman politik dari Relasi menjadi salah satu penghambat untuk menjadi komunikator politik. Relasi menyampaikan pesan politik yaitu tentang pemilu. Dampak politik dari aktivitas pemilu cukup besar sehingga keliruan menyampaikan pesan tentang pemilu akan mempengaruhi frame (cara berpikir) pemilih pemula dan mengurangi trust terhadap pemilu itu sendiri.

Mengukur keberhasilan Relasi secara kuantitas dalam menjalankan tugasnya sebagai komunikator politik "cukup berhasil". Indikatornya, tingkat partisipasi pemilih di DIY Pemilu 2014 mencapai 80,2 % dan tingkat nasional 72,97 %. Namun dari aspek kualitas masih perlu ditelaah lebih jauh karena indikator keberhasilan secara kualitas tidak hanya mereka datang ke bilik suara menggunakan hak pilihnya, tetapi memahami untuk apa mereka memilih atau menggunakan hak pilihnya.

Berdasarkan penelitian, aktivitas relasi kelompok pemilih pemula sebagai komunikator politik belum mampu menyentuh pada persoalan substansi tetapi lebih pada persoalan teknis administratif dalam menggunakan hak pilihnya. Password yang digunakan "satu suara bisa mengubah masa depan bangsa" dan "menjadi pemilih yang cerdas" tidak diikuti dengan bekal yang cukup untuk menjelaskan secara mendalam terkait dengan pemilu, misalnya bagaimana menjadi pemilih yang cerdas, bagaimana mereka akan menentukan pilihan. Paling penting lagi Relasi ini belum memberikan pemahaman tentang keberadaan warga negara dalam pemilu.

KPU yang mempunyai niat baik dengan melibatkan Relasi sebagai patner juga tidak mampu menjaga kontinuitas komunikasi dengan mantan Relasi. Bisa dikatakan Relasi adalah program by project. Dalam posisi seperti ini Relasi sebagai komunikator politik belum mampu membawa perubahan secara signifikan atau berkelanjutan.

Relasi punya keinginan untuk bisa menjadi agen untuk menyebarkan virus politik tetapi keberadaan mereka selesai begitu hajatan pemilu selesai. Ini sangat disayangkan, keberadaan Relasi harusnya terus dijaga sebagai patner bagi KPU untuk menjangkau segmen masyarakat yang strategis.

## **SIMPULAN**

Program Relasi belum mampu membantu KPU Kota/Kabupaten untuk mensosialisasikan persoalan yang substansial dari Pemilu, tapi masih terjebak pada persoalan teknis. Untuk memperbaiki hal ini KPU Kota/Kabupaten perlu melakukan pengembangan materi pembekalan pada saat dilakukan Bimbingan Teknis. Materi yang diberikan tidak hanya materi teknis pemilu tetapi juga materi politik sehingga ketika sebagai komunikator politik bisa dipercaya komunikasi.

Pembekalan kepada Relasi perlu terus menerus dalam bentuk pelatihan pendidikan politik.

Mengingat tujuan utama keberadaan Relasi untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas pemilih maka mekanisme seleksi Relawan Demokrasi diperbaiki. Latar belakang pengetahuan politik menjadi indikator seleksi, khususnya untuk pemilih pemula sehingga bisa melakukan pengembangan atas pesan yang akan disampaikan dan meningkatkan trust.

Relawan Demokrasi sebagai komunikator politik juga perlu menguasai etika komunikasi. Etika bahasa memungkinkan Relasi bisa menjaga kewibawaan sebagai komunikator tanpa perlu ada jarak dengan komunikasi. Etika komunikasi ini akan mempengaruhi etos komunikasi yaitu sikap komunikator yang tercermin dalam kata dan perilakunya yang mengandung perpaduan dari keahlian, kearifan, kebenaran, timbang rasa dan tenggang rasa. Dengan etosnya ini maka komunikator akan menjadi sumber kepercayaan dan sumber daya tarik. Sementara nilai estetika yang harus diperhatikan adalah bagaimana komunikator melancarkan komunikasi, termasuk pemilihan bahasa yang akan digunakan.

Relawan Demokrasi perlu tetap dipertahankan oleh KPU kota/kabupaten untuk menjadi agen dalam menyebarkan virus politik kepada pemilih, khususnya segmen pemilih pemula. Relawan Demokrasi perlu tetap dipertahankan sebagai komunikator politik di tingkat infrastruktur politik dibawah koordinasi KPU kota/kabupaten.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Alfian,(1993), *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Aftiin, Mulyanto, (2014), *Peran Serta Relawan Demokrasi dalam Usaha MeningkatkanPartisipasiPemilih*, Hotel Garda Plaza, Sumatera Utara.
- Ahdiyana, Marita, 2009, Pemilu sebagai waharn Pendidikan Politik, Pidato Ilmiah dalam rangka Dies Natalis XXX STIA-AAN, 13 Juni 2009.
- Anggorowati, Ningrum Puporini, (2011), Penerapan Model Pembelajaran Tutir pada Mata Pelajaran Sosiologi, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol.2 No.2 Oktober. 3 (1) : 103-120
- Apriliaswati, Rahayu, Promoting ((2011), *PeerInteraction to Develop SocialSkill*, *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, Vol.2 No.2 Oktober.
- Azra, Azyumardi, 2006, Paradigma baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi Cet.2, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Bafadal, Ibrahim, 2003 *Teknik Analisis Data Penelitian Kualitatif dalam Metodologi Penelitian Pualitatif : Pinjauan Teoritis dan Praktis*,